

## BUDAYA DAERAH DALAM ERA DESENTRALISASI

*Suhartono W. Pranoto\**

### ABSTRACT

Basically, the local culture is an asset of an ethnic group that must be maintained. It must be assured that the cultural receivers do not neglect the high value of local wisdom. During the era of decentralization, the local culture seems to be strengthened of the state law in order to become a pin point of local enrichment. On the other hand, the local culture, that can be said as traditionalism, will stand side by side with modernism which sponsored by globalization. It means that local culture will be alive forever in the era is decentralization though external attack such globalization is going on.

*Key words:* culture, local culture, decentralization

### PENGANTAR

**D**alam kehidupan, budaya ternyata mengalami proses seperti proses biologis, artinya budaya juga mengalami masa-masa lahir, berkembang, surut, dan bahkan hilang sama sekali. Bagaimanakah kehidupan budaya Indonesia, khususnya budaya nusantara yang tercermin dalam budaya daerah? Pasang-surutnya budaya ini perlu dicermati karena semua etnik di nusantara adalah pendukung yang hidup lekat dan menyatu dengan budaya itu. Dengan kata lain, budaya adalah identitas sehingga kalau budaya itu suram, tentunya identitas juga kabur, kalau budaya tereliminasi, sama dengan tak berbudaya lagi. Semua itu adalah prahara yang menimpa kehidupan manusia, yaitu kehidupan yang berbudaya.

Meskipun prahara budaya merupakan hal yang lumrah dan terjadi di setiap pusat-pusat budaya, seharusnya pewaris budaya merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian budaya itu. Sayang sekali, kalau pusat budaya tidak terpelihara dengan baik,

niscaya akan terjadi periode suram, pudar, dan hilang dari persada nusantara. Periode ini merupakan periode berbahaya dan harus segera ada semacam regu penyelamat untuk mengangkat kembali budaya yang tengah redup itu. Regu penyelamat itu adalah sekelompok pemerhati budaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung terhadap budayanya sendiri. Sebagaimana disebut di atas, budaya merupakan identitas dan merupakan bagian hidup manusia. Kita identik dengan budaya kita. Warna budaya sama dengan warna kita, budaya rendah juga budaya kita, budaya tinggi juga budaya kita.

Namun, apa artinya diversifikasi budaya tanpa melihat stratifikasi sosial budaya. Semua itu harus menjadi bagian atau tanggung jawab kita untuk memelihara, lepas dari penilaian apakah budaya kita itu masuk budaya kraton, budaya desa, budaya rakyat, budaya elite, budaya pinggiran, dan lain-lain. (Barker, 2000).

Budaya layaknya seperti mozaik yang tersusun dan terdiri atas berbagai fragmen

---

\* Staf Pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

yang warna-warni dan memberi kesejukan hati dan ketenangan pikiran jiwa kita. Fragmen-fragmen itu juga terdiri dari subfragmen yang juga tidak kalah indahnya. Di satu fragmen ada warna kehijauan seperti indahnya *pareanom*, merahnya bunga mawar, kuning kunyit, birunya nila banyumasan. Demikian mozaik budaya nusantara yang setiap budaya lokal dalam pengertian daerah mempunyai ciri khas, keindahannya sendiri-sendiri, yang satu berbeda dengan yang lain. Keindahan total itu saling didukung oleh keindahan lokal. Oleh karena itu, budaya lokal harus hidup dan berhubungan terus sehingga membentuk kesatuan mozaik yang bernilai luhur (Fiedman, 1995).

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah sampai pada tingkat manakah budaya daerah sekarang? Sekarang ini, budaya daerah ada dalam kondisi tererosi ataukah dalam kondisi sudah setengah hidup? Kondisi budaya dalam kepayahan memang segera perlu mendapat "suntikan" supaya segar kembali dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau memang kondisi budaya daerah dalam kondisi seperti itu, lalu bagaimana upaya untuk merevitalisasikan supaya identitas daerah tetap menjadi *land mark* atau cap budaya daerah? (Kayam, 1991).

## PUSAT BUDAYA

Seorang pakar antropologi Robert Redfield membuat dikotomi pusat budaya yang disebutnya budaya besar (*great culture*) dan budaya kecil (*little culture*) (Redfield, 1963). Dua kutub budaya itu tentu membawa konsekuensi tentang nilai, kearifan, pendukung, lokasi, dan lain-lain. Budaya besar berpusat di kraton dan budaya kecil ada di desa. Tentu saja, budaya yang *adi luhung* dimengerti sebagai budaya besar, sebagai budaya istana yang tinggi nilainya, yang didukung oleh elite istana. Sebaliknya, budaya kecil dianggap mempunyai nilai yang kurang dan rendah karena pusatnya di desa dengan pendukung para warga desa yang kebanyakan kurang memiliki *sense of culture* yang tinggi.

Kedua pusat budaya, yaitu budaya besar dan kecil, tentu sekarang mengalami

perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Pusat-pusat budaya itu ada yang masih *survive*, tetapi ada juga yang dalam kondisi kehabisan tenaga. Sebaliknya, walaupun besar, budaya besar dapat juga mengalami kondisi surut. Anehnya, juga ada *enclave* budaya kecil yang menyebar di pedesaan karena hadirnya para maestro yang berdomisili di pedesaan dengan mendirikan sanggar-sanggar budaya.

Tampaknya, sekarang kedua pusat budaya makin kurang terdekotomisasikan karena kondisi sekarang berbeda dengan masa kerajaan-kerajaan yang masih menjadi pusat budaya karena legitimasi budaya sebagai identifikasi kerajaan yang kuat. Namun, sekarang keadaannya berbeda karena egalitarianisme dalam kehidupan budaya. Budaya istana dapat juga kurang gairah, tetapi budaya luar istana yang nota bene sebagai budaya kecil lebih banyak merambah dan digemari masyarakat sebagai budaya populer.

Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata variasi budaya luar-istana makin marak dengan nafas dan selera yang berbeda-beda, ada yang berselera religius, kritik sosial, dan sampai pada selera eksotis. Budaya jenis ini diminati sebagian besar masyarakat yang pada umumnya berasal dari kalangan tengah-bawah dan bawah. Sebuah budaya yang nirstratifikasi sosial alias egaliter dan berbagai diskriminasi sosial yang mengendala dan semua dapat masuk ke dalamnya karena seni budaya itu mampu menampung keinginan masyarakat untuk dinikmati bersama.

Pusat budaya telah bergeser dari pusat-pusat tradisional ke pusat baru. Bukankah ini hal yang biasa. Memang pergeseran pusat budaya selalu berhubungan dengan minoritas kreatif (*creative minority*) yang *di-back up* oleh "penguasa" apakah kekuasaan riil atau kekuasaan ekonomi finansial. Tampaknya, setelah pemerintahan otoriter yang juga merambah ke bidang budaya telah usai, kekuasaan riil sudah tidak tampak dalam mencampuri pusat budaya.

Yang lebih menonjol adalah kekuasaan ekonomi finansial yang mampu memengaruhi dan bahkan menciptakan kehidupan

budaya. Memang, tidak dapat ditolak bahwa pengertian *Zeitgeist* budaya atau jiwa zaman budaya merepresentasikan budaya pada zamannya. Kalau dulu dalam pemerintahan kerajaan didominasi sistem sosial feodal, semua kegiatan budaya di-*back up* oleh dinamika masyarakat feodal yang berasal dari kekayaan hasil agraris. Sekarang, masyarakat dalam transisi ke semiindustri yang meninggalkan sistem sosial feodal, tetapi masyarakat yang terakhir itu mampu hidup dari pengelolaan semi-industri yang sedang berkembang (Suhartono, 2000).

Jadi, pergeseran pusat budaya dan penyebarannya juga telah bergeser dari pusat lama ke pusat baru. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pusat lama yang sudah tereduksi mampu bangkit kembali dan pusat baru juga mampu bertahan. Dalam kondisi sosial budaya yang bagaimanakah suatu budaya, entah budaya tinggi atau populer, mampu bertahan?

#### KANDUNGAN BUDAYA DAERAH

Pergeseran masyarakat dari tradisional yang sedang menuju ke modern meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya. Nilai-nilai itu telah tererosi sehingga makin berkurang. Hal inilah yang memprihatinkan. Selanjutnya, yang diharapkan, tentunya, adalah masyarakat yang moderen, tetapi dilandasi nilai tradisional yang tinggi. Artinya, tradisionalitas tetap berdampingan dengan modernitas. Mungkin ini sesuatu yang sulit karena untuk sampai ke modernitas harus mengorbankan tradisionalitas. Sayang, kalau memang demikian.

Sebelum sampai ke masyarakat modern, tentu kita memperhatikan budaya sebagai warisan bangsa atau etnik yang dapat kita rasakan sampai sekarang (*cultural heritage*). Mengapa hal itu dapat mewaris dari generasi ke generasi dapat dipastikan bahwa budaya mempunyai beberapa kandungan nilai yang sangat berharga bagi kelangsungan suatu bangsa atau etnis tertentu.

Kandungan budaya lokal yang menyebar dan menggenerasi berlangsung karena nilai-nilai budayanya yang mampu melindungi berbagai aspek kehidupan seperti

kehidupan politik, sosial, ekonomi, religius, dan masih banyak lagi yang terkait. Di antara kandungan-kandungan yang sudah disepakati dalam budaya daerah antara lain adanya:

1. identifikasi daerah (*local identification*). Sudah disebut di atas bahwa budaya menjadi identifikasi suatu bangsa atau etnik. Budaya *ngapu rancang* adalah si-kap sopan, hormat dan loyal terhadap atasan atau yang dituakan. Hal ini tercermin dalam budaya Jawa (Yogya-Sala). Bangsa lain pun mempunyai identifikasi dalam menghormati orang lain, seperti orang Jepang dengan membungkuk dalam-dalam. Jadi, kalau ada orang yang bersikap *ngapu rancang* dalam berbicara, misalnya, dapat diasumsikan bahwa orang itu mengikuti budaya Jawa yang identifikasi dengan spesifikasinya *ngapu rancang*.
2. kearifan daerah (*local wisdom*). Sikap arif dapat dipastikan dimiliki oleh setiap daerah karena walaupun berbeda daerah, tetapi ada hal-hal yang bersifat umum. Misalnya, untuk tidak membantu orang yang bersalah dan menghukum siapa saja yang melanggar undang-undang adalah sikap kearifan yang harus dijunjung tinggi.
3. pencerdas daerah (*local genius*). Hampir setiap masyarakat ada minoritas yang memiliki kemampuan berpikir yang luas. Merekalah sebenarnya obor masyarakat yang akan membawa kemana masyarakat pergi. Buah pikiran akan akan dijalankan oleh pelaksana pemerintahan yang kemudian diikuti oleh masyarakatnya.
4. budaya kreatif (*creative culture*). Sebagai kelanjutan dari minoritas kreatif, tentunya mereka yang sudah ada dalam ranah budaya kreatif akan menghasilkan kreasi-kreasi baru. Kreasi inilah yang menyambung kehidupan budaya yang telah ada. Jadi, kreator baru seharusnya bermunculan di daerah-daerah.
5. kemandirian budaya (*cultural independence*). Keberadaan suatu budaya sejak dari awalnya adalah kreasi elite yang merupakan minoritas kreatif yang dalam

kelangsungannya didukung oleh kekuasaan politik dan ekonomi. Kait-mengait antarfaktor itu tidak dapat dilepaskan. Namun, faktor-faktor itu hidup dalam satu daerah yang sudah merupakan kebulatan. Kalau kebulatan itu dari tidak ada menjadi ada dan pemeliharannya berlangsung dari generasi ke generasi itu berarti bahwa kemandiriannya sangat kuat. Oleh karena itu, kemandirian budaya harus dijaga supaya kelestariannya berjalan menggenerasi.

6. iklim sosio-kultural (*socio-cultural sphere*). Lajunya modernisasi di semua bidang kehidupan diperlukan iklim sosial budaya yang mendukung agar masyarakat sebagai pemilik warisan budaya itu secara sadar melakukan pelestarian budaya.

### KONDISI BUDAYA SEKARANG

Bagaimana kondisi sekarang jika dibandingkan antara budaya di satu pihak dan politik serta ekonomi di pihak lain? Hal ini harus dilihat dari awal bahwa budaya memang sudah ada sebelumnya dan dalam perkembangannya perubahan-perubahan sangat lambat atau nyaris tidak berubah. Dalam kondisi seperti ini, budaya lebih banyak bertahan, sedangkan politik dan ekonomi sangat labil, kadang-kadang sampai pada *booming*, terkadang sangat kelelahan.

Sekarang adalah era global sehingga budaya luar dengan mudah masuk dan menyusup dalam budaya kita. Sulit penanggulangannya selama hal ini bersifat langsung sampai ke konsumen, yaitu masyarakat kita. Tentu saja, harus direspon lewat kemampuan kultural kita. Akan tetapi, tampaknya respon kita kurang kuat dan kalah dengan masuknya budaya luar yang secara tidak langsung mereduksi budaya Indonesia.

Apalagi dengan berkembang dan merambahnya informasi teknologi ke seluruh penjuru nusantara ini, praktis seluruh daerah terkena dampak globalisasi informasi. Pada hal, mestinya ada distansi antara kondisi sistem budaya lokal dengan pemancar

budaya dari luar itu. Penerima budaya kita dengan cepat mengkonsumsi unsur-unsur budaya yang dikemas dalam berbagai cara sehingga mereka tidak merasa kalau mereka sudah kemasukan budaya asing.

Memang, respon terhadap pengaruh budaya asing mestinya harus diimbangi dengan cara-cara sebagaimana yang masuk, tetapi tentunya budaya Indonesia yang jenisnya lain agak sulit menjadi budaya dengan kecenderungan baru yang lebih *ngetren* ke budaya populer. Budaya daerah diperkirakan ada dalam kondisi ini, bergerak tidak mampu, dan kalau menerima itu rasanya kurang pas. Jadi, terjangkit situasi dilematis. Kondisi terdesak ini walau bagaimana mesti harus diantisipasi, ditanggulangi demi kehidupan dan kelangsungan budaya daerah.

Tampaknya, sponsor budaya global lebih menyukai budaya dengan dibungkus kepentingan komersial. Mau tidak mau kondisi budaya lokal makin terdesak dan dalam kondisi yang tidak enak. Budaya lokal lebih diminati kelompok minoritas masyarakat dan umumnya generasi tua, sedangkan kawula muda lebih senang mengonsumsi budaya instan yang tidak perlu bertele-tele dan yang dianggapnya *up to date* dan bergengsi (Hannerz, 1996).

Memang, menarik konsumen budaya untuk lebih menyenangi budayanya sendiri diperlukan kiat tersendiri. Hal ini dimaksudkan lebih jauh supaya masyarakat tidak tercabut dari akar budaya lokalnya, apalagi hilang tak berbekas. Sosialisasi budaya tidak dapat dihindarkan lewat berbagai segi dan isi kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bagaimana keluarga mempersepsikan budaya dalam kehidupan keluarganya? Hal ini harus dianggap sebagai kebutuhan hidup yang melekat pada kehidupan keluarga. Jadi, *sense of culture* memang sudah ada pada keluarga, yaitu lahir untuk berbudaya. Secara instruksional, budaya memang harus diajarkan di sekolah agar lebih kuat dalam pemikiran siswa. Selanjutnya, aplikasi budaya perlu disampaikan di masyarakat sebagai ajang kreasi dan pelatihan yang diselenggarakan di keluarga dan sekolah. Hal ini merupakan pertahanan (*defence*) yang

cukup tangguh dalam menghadapi budaya luar.

Apakah benar pemahaman budaya dilakukan lewat instruksi, dalam arti keterpaksaan (*pressures*), ataukah lewat kesadaran (*consciousness*)? Tampaknya, kalau yang terakhir itu dapat juga dalam proses waktu lama dan kalau memilih lewat jalan pertama dianggap otoriter dan membunuh kebebasan. Barangkali yang dapat ditempuh adalah melalui jalur sebagaimana yang sudah disebut di atas tanpa menghilangkan unsur-unsur yang mengganggu ranah domein privat.

### **DESENTRALISASI “PENOLONG” BUDAYA DAERAH**

Terbitnya Undang-undang Desentralisasi dan Otonomi Keuangan Daerah no 22 dan 25/1999 mungkin dianggap sebagai dewa “penolong” bagi kehidupan budaya daerah. Benarkah demikian? Hal ini perlu dikaji hubungan kedaerahan dengan penyandang dana daerah sebagai motor penggerak dan revitalisasi budaya daerah (UU RI No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah).

Memang, tampaknya desentralisasi merupakan penyegar atau iklim baru bagi revitalisasi budaya. Namun, perlu dilihat juga seberapa jauh daerah yang memiliki pendapatan daerah yang tinggi akan berbeda dengan yang rendah. Bagaimana mungkin daerah yang rendah pendapatan asli daerahnya (PAD) akan mampu membiayai revitalisasi dan kreasi budaya, sedangkan untuk pembiayaan yang lebih urgen saja masih kurang sempurna. Lagi pula, revitalisasi budaya tentu dianggap prioritas yang nomor belakangan. Kedua, untuk daerah-daerah yang memang tidak memiliki warisan budaya yang kuat diperkirakan pengembangan pemikiran budaya daerahnya akan sangat terkendala. Ketiga, lebih-lebih untuk masa sekarang ini harus diperhatikan dengan orientasi pasar budaya. Artinya, apakah reproduksi budaya itu dapat menghasilkan biaya lebih dari pemasaran budaya daerah itu. Dengan kata lain, apakah budaya daerah menjadi konsumen turis domestik atau asing sehingga seberapa jauh daerah itu dapat “dijual”?

Keempat, lepas dari yang sudah disebut di atas, *interest* atau kepentingan menjadi kunci utama bagi pengembangan budaya daerah. Kalau budaya dianggap sebagai kepentingan masyarakat dan menjadi prioritas utama pasti budaya itu dikembangkan di daerah-daerah. Sampai sekarang, baik pemerintah maupun masyarakat banyak yang belum faham (*verstehen*) kegunaan budaya bagi pembangunan bangsa.

Bagaimana dengan daerah tertentu? Jika melihat beberapa butir di atas, tampaknya daerah tertentu mampu menyelenggarakan revitalisasi budaya dengan desentralisasi, artinya kemandekan budaya yang sedang berlangsung itu dapat didongkrak dengan menyelenggarakan event budaya dengan berbagai gebyar untuk promosi budaya. Tentunya, semuanya itu harus dikemas sehingga konsumen tertarik dan senang mengonsumsi budaya daerah dalam pengertian lain, yaitu memiliki spesifikasi atau kekhasan daerah.

Suatu hal yang sudah menjadi biasa di negara ini adalah keterlibatan dalam budaya politik. Selagi budaya digandeng oleh politik, budaya itu akan hidup, tetapi selagi pergantian rezim yang tidak mampu membaca budaya dipastikan budaya itu akan ditinggalkan oleh politik. Memang memelihara budaya sangat mahal biayanya dan dianggap mengingkari kebutuhan mendesak yang ada di muka mata. Namun, jika dipandang lebih jauh bila budaya ini diterlantarkan, butir-butir yang sudah disebut di atas akan memunculkan disorientasi dan bangsa kita akan mengalami kemandekan budaya.

Dalam diplomasi internasional pun, duta budaya dan duta seni sangat diperlukan untuk memperkenalkan budaya nusantara. Artinya, sampai seberapa jauh budaya nusantara memiliki ciri khas yang dapat disejajarkan dengan budaya negara lain? Ketinggian budaya bangsa sangat tergantung dan dapat diketahui dari budaya materiil dan seni gerak yang mampu mempesona.

Sehubungan dengan hal ini, apakah budaya daerah mampu menghadapi kompetisi dengan budaya lain setelah *survive* dari budaya daerah dan apakah kemudian masuk dalam budaya nasional? Tentu saja, harapan

paling akhir adalah kemampuan masuk dalam ranah budaya internasional yang disajikan dalam berbagai festival internasional.

### KOMODIFIKASI DAN MEDIASI BUDAYA

Dunia global menantang unsur-unsur properti bangsa untuk dikompetisikan. *World market oriented* sudah menjadi jargon dunia karena di sini ditantang untuk menembus batas dan masuk dalam pasar internasional (Fiedman, 1995). Telah diketeahui bahwa semua saja yang masuk dalam pasar mesti dalam kemasan yang bagus untuk merebut hati pembeli. Jadi, *cultural quality* memang harus memenuhi selera konsumen dunia. Mau tidak mau budaya harus dikomodifikasikan agar masuk pasar untuk mendapatkan konsumen. Kita sebagai bangsa biasanya *ewuk pakewuh*, rasa sungkan mengapa budaya dikomodifikasikan. Tabu, itu dulu, tetapi pada zaman global rasa tabu sudah waktunya dihilangkan. Gengsi yang tersisa dalam masyarakat feodal tampaknya masih kuat sehingga komodifikasi yang lain pun tertinggal dengan bangsa lain.

Sebenarnya, komodifikasi yang lain-lain tujuan utamanya dan yang lebih dulu adalah kemasan yang berkualitas dan kalau memang itu dikonsumsi orang lain tentu yang seimbang dengan kualitasnya. Sejalan dengan mediasi budaya untuk sekarang ini, bantuan informasi teknologi sudah tidak terkendala lagi untuk mempromosikan budaya itu ke pasar internasional. Promosi dengan iklan di *website* yang dapat dibuka oleh semua insan dunia sehingga mereka dengan cepat dapat dikenal lebih dulu dan selanjutnya untuk dinikmati pada event tertentu. "Yogyakarta *truly* Indonesia," demikian komodifikasi dan mediasi budaya Yogyakarta lewat media mutakhir.

Respon terhadap *rasa ewuh pakewuh* yang melanda dunia budaya akan teratasi dengan dibukanya Program Studi Kajian Budaya dan Media di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Artinya, bagaimana seharusnya budaya itu memposisikan diri dalam dunia global, tampaknya sekarang sudah bukan tabu lagi. Budaya dikomodifikasikan dan dimediasikan. Tujuannya adalah memperkenalkan pada dunia, meski mengharapkan *reward* yang sepadan.

### REVIVALISASI BUDAYA

Setelah memperhatikan paparan di atas, kita tidak menutup mata untuk melakukan evaluasi budaya terlebih dahulu. Seberapa jauh kondisi budaya daerah itu mampu dikomodifikasikan? Kalau tujuannya adalah komodifikasi tentu akan melihat budaya dalam revivalisasi yang akan dibangkitkan kembali lewat kekuatan atau dana-dana daerah. Pemerintah daerah tentu tidak hanya memikirkan anggaran untuk membiayai budaya saja, tetapi nanti akan dapat *reward* atau masukan berbagai pendapatan dari komodifikasi budaya daerah itu.

Dengan pengembangan budaya daerah, tentu pemerintah daerah akan terangkat prestisnya karena pemerintah masih mampu membantu kebangkitan kembali budaya daerah yang mau tidak mau budaya daerah menjadi asset daerah dan akhirnya sampai pada kebanggaan daerah.

Sebenarnya, untuk Yogyakarta, sebagai contoh, revivalisasi tidak terlalu sulit karena pusat-pusat budaya itu masih ada di berbagai tempat. Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya masih memiliki naluri budaya yang kuat dan tampaknya hal ini tidak akan hilang. Oleh karena itu, penggalakan revivalisasi budaya sebenarnya tinggal "sekali pukul" saja sudah bangkit kembali. Namun, sekali lagi kebangkitan harus juga disongsong dengan *maintaining* dan *marketing* yang berstandar sehingga tidak menecewakan konsumen budaya (Hannerz, 1996).

Momen yang sangat penting bagi revivalisasi budaya daerah adalah berlangsungnya festival seperti Festival Kraton Nusantara akhir bulan September 2004. Kraton seperti sudah disinggung di atas adalah pusat budaya besar. Sekarang yang dipertanyakan adalah apakah kraton masih juga mewarisi posisi seperti dulu sebagai pusat budaya. Seandainya masih, tentu kraton akan tetap memberi obor penerang bagi revivalisasi budaya daerah. Akan tetapi, seandainya budaya itu sudah menyebar ke darah-daerah, selayaknyalah dipelihara keberadaannya agar tetap survive sebagai budaya daerah.

## SIMPULAN

Sebagai akhir dari perbincangan Perspektif Budaya Daerah dalam Era Desentralisasi, diperkirakan semua unsur terkait di daerah harus memandang bahwa budaya adalah asset daerah yang harus dihidupi dan dipelihara dengan baik. Jangan sampai sebagai penerima warisan budaya (*cultural heritage*) yang tinggi menerlantarkan sehingga tak terawat dengan baik. Ini tentu sebagai pewaris budaya dapat disebut tidak tanggap terhadap proyeksi budaya sebagai asset bangsa.

Budaya daerah dalam era global sekarang ini cukup prospektif, karena memang di samping globalisasi di satu segi yang semuanya menuntut generalisasi, tetapi di pihak lain dituntut untuk masih menghidupkan atau menyelenggarakan spesifikasi budaya daerah. Budaya lokal adalah muatan lokal yang mempunyai ciri tersendiri yang membedakan dengan yang lain.

Lewat berbagai elemen masyarakat pendukung budaya, diperkirakan budaya lokal akan tetap *survive* di tengah hiruk pikuknya modernisasi dalam masyarakat. Budaya lokal tetap mendapat tempat di hati masyarakat karena ia adalah wadah kehidupan masyarakat sehingga sedapat mungkin menyandingkan antara tradisionalitas budaya dengan modernitas masyarakat. Artinya, masyarakat moderen pun masih mengonsumsi produk tradisionalitas. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi.

Budaya daerah menjadi barometer masyarakat daerah. Kalau budaya daerahnya terpelihara dengan baik, tentu masyarakatnya terjalin kekeluargaannya dengan baik pula, aman, dan sejahtera. Revivalisme budaya daerah berarti makin maraknya kreativitas budaya, lebih-lebih Yogyakarta, contohnya, sebagai kota pendidikan, termasuk pendidikan budaya dan seni yang tentu mampu menjadi penyangga budaya daerah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Baker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London and New Delhi: Sage.
- Fiedman, Jonathan. 1995. *Cultural Identity and Global Process*. London and New Delhi: Sage.
- Harmerz, Ulf. 1996. *Transnational Connections*. London and New York: Routledge.
- Kayam, Umar. 1991. *Transformasi Budaya Kita*. Yogyakarta: Gama Press.
- Redfield, Robert. 1963. *The Little Community and Peasant Society and Culture*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Said, Edward. 1993. *Culture and Imperialism*. London: Chatto & Windus, 1993.
- Soedjatmoko. 2001. *Kebudayaan Sosial*. Yogyakarta: Melibas.
- Suharto. 2000. *Serpihan Budaya Feodal*. Yogyakarta: Agastya Media.
- Anonim. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Novindo Rustaka Mandiri.